



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

Minutes of Meeting

Rapat Konsultasi Forum *Multi Stakeholder Group* (MSG)

Hari/Tanggal : Selasa, 23 Maret 2021
Waktu : 14.00 s.d. 16.00 WIB
Agenda : Permohonan Persetujuan Publikasi Laporan EITI ke-8
Tempat : Video Conference Webex Meeting Room
Pimpinan Rapat : Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Resume Hasil Rapat

1. Rapat konsultasi MSG dilaksanakan berdasarkan Undangan Sekretaris Jenderal KESDM, Nomor: 24.Und/DI.02/SJN.D/2021 pada tanggal 19 Maret 2021 secara virtual. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari:
 - a. Pemerintah Pusat: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Keuangan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, SKK Migas.
 - b. Perusahaan dan Asosiasi: Asosiasi Petroleum Indonesia, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, *Indonesian Mining Association*.
 - c. Pemerintah Daerah: Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Kegiatan rapat tim pelaksana diadakan dalam rangka untuk persetujuan publikasi laporan EITI 2018.
3. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang mewakili Sekretaris Jenderal ESDM menjelaskan hal-hal berikut:
 - a. Sekretariat transisi EITI Indonesia yang dikoordinir KESDM dengan arahan Menteri ESDM dan di monitor oleh Staf Ahli Menteri ESDM bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam, telah berhasil menyelesaikan penyusunan laporan

EITI Indonesia yang ke-8 dengan mengakomodasi perbaikan dan masukan yang telah diberikan oleh Forum MSG pada Rapat MSG pada 8 Maret 2021 dan juga masukan dari Sekretariat EITI Internasional di Oslo. Laporan EITI Indonesia ke-8 ini berisi tiga buku yaitu Ringkasan Eksekutif, Laporan Kontekstual, dan Lampiran Data Perusahaan.

- b. Akhir bulan Maret ini, merupakan target yang harus kita penuhi untuk menjaga penilaian Indonesia sebagai EITI *Implementing Countries* dari EITI International yaitu publikasi laporan EITI ke 8. Terkait atas hal tersebut, Rapat MSG kali ini memiliki tujuan untuk mendapatkan persetujuan dari Tim MSG sehingga kami dapat segera menyerahkan ke Sekretariat EITI Internaional dan mempublikasikan hasil laporan final tersebut melalui portal website <https://eiti.esdm.go.id>.
- c. Agenda kerja forum transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah tahun 2021, , secara umum terdapat dua pokok utama kegiatan EITI yaitu: Sosialisasi Laporan EITI ke-8, serta Penyelenggaraan diseminasi dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)*, seminar/dialog, maupun *workshop* terkait transparansi industri ekstraktif di Indonesia dalam rangka mewujudkan nyatakan proses pengarusutamaan implementasi EITI pada proses bisnis pengelolaan industri ekstraktif di Indonesia.
- d. Dalam melaksanakan kegiatan EITI di tahun 2021, Indonesia juga akan mendapatkan dukungan hibah *Extractive Global Programmatic Support (EGPS)* Grant dari World Bank untuk mendukung dan mempercepat proses mainstreaming EITI di Indonesia. Saat ini proses hibah ini masih dalam tahap menunggu proses registrasi DRKH di Bappenas pada bulan April 2021 sebelum dilakukan proses *grant signing*.
- e. Beberapa poin usulan dari Sekretariat EITI Internasional hasil rapat koordinasi rutin pada tanggal 17 Maret 2021 antara lain:
 - Usulan kerjasama mitigasi anti korupsi dengan lembaga internasional anti korupsi,
 - Rencana pelaporan data *commodity trading* pada kegiatan pelaporan EITI selanjutnya, serta
 - Rencana kegiatan asesmen mengenai dampak penerapan EITI Standard terhadap tata Kelola pemerintah Indonesia selama

keikutsertaan Indonesia sebagai EITI *Implementing Countries*.

4. Tim Sekretariat EITI menjelaskan secara umum Laporan EITI Indonesia Tahun 2018 terdiri dari tiga buku: Ringkasan Eksekutif, Kontekstual, dan Lampiran.
 - a. Buku pertama, berisi ringkasan eksekutif yang berisi ringkasan dari seluruh laporan EITI Indonesia Tahun 2018.
 - b. Buku kedua, berisi informasi kontekstual dari sektor industri ekstraktif di Indonesia. Informasi kontekstual memberikan gambaran secara menyeluruh tentang kerangka hukum dan mekanisme tata kelola sektor migas dan minerba, jenis kontrak/izin dan proses lisensi yang ada, serta pembayaran-pembayaran dan skema pembagian hasil antara perusahaan-perusahaan dengan pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
 - c. Buku ketiga, berisi laporan hasil pengumpulan data-data dari perusahaan pelapor EITI terkait penerimaan negara di tahun 2018. Penerimaan tersebut menyangkut penerimaan pajak dan nonpajak.

Pertanyaan dan Tanggapan dari Peserta Rapat

A. PWYP

1. Secara umum laporan EITI Indonesia ke-8 sudah baik, Namun perlu di cek kembali kesesuaian laporan dengan standar EITI yang belum tercakup dalam laporan ini.
2. Terkait keterbukaan kontrak, mungkin dapat ditambahkan ke dalam salah satu bab, yang menjelaskan bahwa Indonesia pada tahun 2021 akan membuat roadmap atau tahapan keterbukaan kontrak. Kedepannya perlu diskusi lebih lanjut terkait keterbukaan kontrak.

B. Pusdatin ESDM

1. Terkait keterbukaan kontrak, mulai tahun 2021, kontrak-kontrak akan diminta untuk *disclose*, Namun, tetap menunjung tinggi peraturan dalam negeri. Jika peraturan dalam negeri belum bisa *disclose*, maka perlu disampaikan bahwa pemerintah tetap berupaya untuk mencapai keterbukaan kontrak.
2. Analisis dan rekomendasi kapitalisasi SDA akan disampaikan pada laporan berikutnya. Berdasarkan hasil konsultasi dengan EITI Internasional, terdapat satu sumber kegiatan dari USAID yang mengevaluasi manfaat dan dampak dari EITI.

Dengan keterlibatan Indonesia di dalam EITI dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan SDA, termasuk kapitalisasi.

3. Indonesia mendapatkan apresiasi dari Sekretariat EITI International bahwa ada inisiatif dari Stranas PK untuk mengenakan *quantity assurance* untuk pengelolaan SDA yang saat ini sedang di uji coba di Migas dan sedang proses SNI.
4. Laporan EITI akan disubmit paling lambat 31 Maret 2021. Masukan terkait draft laporan akan ditunggu hingga Jumat, 24 Maret 2021.

C. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Di dalam EITI Internasional ada 3 tahapan keterbukaan kontrak, yaitu:
 - Secara keseluruhan dari kontrak,
 - Bagian-bagian tertentu dari kontrak, atau
 - Menjelaskan upaya dari pemerintah untuk mendorong keterbukaan kontrak.
2. Hal ini bukan hanya sekedar laporan, tetapi harus memberikan dampak yang bisa diukur. Dalam konteks itulah maka ke depannya diharapkan akan lebih baik.

D. Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

1. Secara umum laporan EITI Indonesia ke-8 sudah komprehensif. Namun, terkait data LKPP 2020, perlu ditambahkan *disclaimer* bahwa data LKPP 2020 masih *unaudited*.
2. Kemenkeu meminta diberikan waktu untuk mengoreksi kembali data yang bersumber dari LKPP apakah sudah sesuai dengan sumber data.

E. Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan

1. Memberikan koreksi redaksi laporan terkait tugas Ditjen Anggaran.
2. Pada prinsipnya adalah satu data, jika terdapat perbedaan data maka seharusnya dapat dijelaskan apakah audited atau unaudited.

F. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia

Secara umum, laporan ini sudah bagus dan membanggakan dengan keterbatasan waktu yang dimiliki. APBI dan tim akan membahas lebih detail secara internal terhadap lampiran laporan. APBI mendukung agar laporan ini dapat segera di submit untuk memenuhi target *compliance*.

G. SKK Migas

SKK akan memberikan masukan terhadap draft laporan paling lambat pada hari Jumat, 26 Maret 2021.

H. Pak Edi Effendi Tedjakusuma

1. Perlu di tekankan *comprehensiveness* pada penerimaan industri ekstraktif Indonesia.
2. Terkait PETI, perlu di jelaskan bahwa itu kegiatan ilegal yang pemerintah tidak mengakui hal tersebut dan perlu juga dijelaskan tindakan pemerintah seperti apa.
3. Keterbukaan kontrak, BUMN, dan dana bagi hasil perlu dijelaskan kebijakan Indonesia seperti apa.

I. Dinas ESDM Riau

Laporan EITI sudah baik, pemda mengharapkan agar dapat memanfaatkan laporan ini untuk menjustifikasi DBH Migas.

--ooOoo--